

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

CONTOH FORMAT SURAT DAN DOKUMEN DALAM RANGKA PEMBERIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
melalui Kantor Pelayanan Pajak
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (5)
Nomor Pokok Wajib Pajak : (6)
jabatan : (7)
alamat : (8)
nomor telepon : (9)
bertindak selaku : ☐ wajib pajak ☐ wakil ☐ kuasa

dari wajib pajak:

nama : (10)
Nomor Pokok Wajib Pajak : (11)
alamat : (12)

atas Objek Pajak:

Nomor Objek Pajak : (13)
alamat Objek Pajak : (14)

bersama ini mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan/Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan*):

nomor : (15)
tanggal : (16)
Tahun Pajak : (17)
Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar : Rp..... (18)



besarnya Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan : (19)

Alasan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan:
.....
..... (20)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.		
2.		
dst.	 (21)	 (21)

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib pajak/wakil/kuasa*)

..... (22)

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
- 2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.



PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi nomor sesuai dengan penomoran surat wajib pajak.
- Nomor (2) : Diisi nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (7) : Diisi jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi alamat wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (9) : Diisi nomor telepon wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (10) : Diisi nama wajib pajak dalam hal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.
- Nomor (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak dalam hal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.
- Nomor (12) : Diisi alamat wajib pajak dalam hal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.
- Nomor (13) : Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan



Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Nomor (14) : Diisi alamat letak Objek Pajak yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (15) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (16) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (17) : Diisi Tahun Pajak.
- Nomor (18) : Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (19) : Diisi besarnya persentase (%) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang dimohonkan wajib pajak.
- Nomor (20) : Diisi alasan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (21) : Diisi jenis dan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (22) : Diisi tanda tangan dan nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang mengajukan permohonan.



B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK YANG
MENYATAKAN BAHWA OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERKENA BENCANA ALAM ATAU SEBAB LAIN YANG LUAR BIASA

SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK
BAHWA OBJEK PAJAK TERKENA BENCANA ALAM ATAU SEBAB LAIN
YANG LUAR BIASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (1)
Nomor Pokok Wajib Pajak : (2)
jabatan : (3)
alamat : (4)
nomor telepon : (5)
bertindak selaku : ☐ wajib pajak ☐ wakil ☐ kuasa

dari wajib pajak:

nama : (6)
Nomor Pokok Wajib Pajak : (7)
alamat : (8)

atas Objek Pajak:

Nomor Objek Pajak : (9)
alamat Objek Pajak : (10)

dengan ini kami menyatakan bahwa:

- a. atas Objek Pajak tersebut di atas telah terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa yaitu (11) pada hari (12), tanggal (13);
- b. besarnya perkiraan kerugian materiil yang ditimbulkan atas bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu sebesar Rp (14) (..... (15)).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Wajib pajak/wakil/kuasa*)

..... (16)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK YANG
MENYATAKAN BAHWA OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERKENA BENCANA ALAM ATAU SEBAB LAIN YANG LUAR BIASA

- Nomor (1) : Diisi nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh wajib pajak, Nomor (3) tidak perlu diisi.
- Nomor (4) : Diisi alamat wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (5) : Diisi nomor telepon wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (6) : Diisi nama wajib pajak dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.
- Nomor (8) : Diisi alamat wajib pajak dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.
- Nomor (9) : Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (10) : Diisi alamat letak Objek Pajak yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (11) : Diisi jenis bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- Nomor (12) : Diisi nama hari saat terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- Nomor (13) : Diisi tanggal saat terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- Nomor (14) : Diisi besarnya perkiraan kerugian materiil yang ditimbulkan atas bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dalam angka.



- Nomor (15) : Diisi besarnya perkiraan kerugian materiil yang ditimbulkan atas bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dalam huruf (terbilang).
- Nomor (16) : Diisi tanda tangan dan nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan.



C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DISAMPAIKAN TIDAK PADA TEMPATNYA

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Disampaikan Tidak pada Tempatnya

Yth.
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor (7) tanggal (8) hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas (9) nomor (10) tanggal (11) yang diterima tanggal (12), disampaikan bahwa surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Saudara tidak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar.

Bersama ini kami kirimkan kembali surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Saudara untuk selanjutnya dapat disampaikan kembali melalui Kantor Pelayanan Pajak (13).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (14)



PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN
PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DISAMPAIKAN
TIDAK PADA TEMPATNYA

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor surat
- Nomor (3) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran.
- Nomor (6) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.
- Nomor (7) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (8) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (9) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (10) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (11) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (12) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (13) : Diisi nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat seharusnya wajib pajak menyampaikan surat permohonan.
- Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.



D. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan

Yth.
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor (7) tanggal (8)
hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas (9)
nomor (10) tanggal (11) yang diterima tanggal (12),
bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengujian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan dan/atau persyaratan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c. dst. (13)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembalikan dan berdasarkan ketentuan (14) Saudara (15) mengajukan permohonan kembali.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (16)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran.
- Nomor (6) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.
- Nomor (7) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (8) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (9) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (10) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (11) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (12) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (13) : Diisi penjelasan ketentuan dan/atau persyaratan yang tidak terpenuhi.
- Nomor (14) : Diisi dasar ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini yang mengatur mengenai dapat atau tidaknya permohonan diajukan kembali.
- Nomor (15) : Diisi pernyataan dapat atau tidak dapat.
- Nomor (16) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.



E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN

..... (1)

Nomor : (2)

..... (3)

Sifat : Segera

Hal : Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan

Yth.

..... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor (5) tanggal (6) hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas (7) nomor (8) tanggal.....(9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

1.;

2.;

3. dst. (10)

Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:

nama :; (11)

jabatan :; (12)

tempat : , (13)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, penyelesaian permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.
- Nomor (5) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (7) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (8) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (10) : Diisi jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimintakan kepada wajib pajak.
- Nomor (11) : Diisi nama petugas yang meneliti permohonan wajib pajak.
- Nomor (12) : Diisi jabatan petugas yang meneliti permohonan wajib pajak.
- Nomor (13) : Diisi nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan akan diberikan.
- Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.



F. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan Tambahan

Yth.
..... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor (5) tanggal (6) hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas (7) nomor (8) tanggal.....(9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi:

- 1.;
- 2.;
- 3. dst (10)

Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada:
nama :; (11)
jabatan :; (12)
tempat :; (13)
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, penyelesaian permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (14)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.
- Nomor (5) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (7) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (8) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (9) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (10) : Diisi jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang dimintakan kepada wajib pajak.
- Nomor (11) : Diisi nama petugas yang meneliti permohonan wajib pajak.
- Nomor (12) : Diisi jabatan petugas yang meneliti permohonan wajib pajak.
- Nomor (13) : Diisi nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan akan diberikan.
- Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.



G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain

Yth.
..... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor (5) tanggal (6) hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas (7) nomor (8) tanggal (9), dengan ini diberitahukan bahwa akan dilaksanakan peninjauan di lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan wajib pajak, dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada:

hari/tanggal : (10)
lokasi : (11)

Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada petugas.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (12)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN
PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.
- Nomor (5) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (7) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (8) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (9) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (10) : Diisi hari dan tanggal pelaksanaan peninjauan.
- Nomor (11) : Diisi lokasi pelaksanaan peninjauan.
- Nomor (12) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.



H. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Lampiran : (4)
Hal : Panggilan Pembahasan

Yth.
..... (5)

Sehubungan dengan Surat Saudara:

No.	Nomor Surat	Tanggal
1.	 (6)	 (7)

hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas:

No.	Jenis Ketetapan	Nomor	Tanggal
1.	 (8)	 (9)	 (10)

dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal :; (11)
waktu :; (12)
tempat : (13)

Mengingat pentingnya pembahasan dimaksud, diharapkan Saudara dapat hadir tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:

- 1.
- 2.
- 3. dst. (14)

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran
- Nomor (5) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.
- Nomor (6) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (8) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (9) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (11) : Diisi hari/tanggal pelaksanaan pembahasan.
- Nomor (12) : Diisi waktu pelaksanaan pembahasan.
- Nomor (13) : Diisi tempat pelaksanaan pembahasan.
- Nomor (14) : Diisi jenis dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.
- Nomor (15) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.



I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN

..... (1)

BERITA ACARA
PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,
DAN/ATAU KETERANGAN
NOMOR (2)

Pada hari ini (3), tanggal (4) bulan (5)
tahun (6), kami:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.			
2.	 (7)	 (7)	 (7)

sesuai dengan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan nomor (8) tanggal (9) dalam rangka penyelesaian permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dari (10) berupa:

No	Dokumen, data, informasi dan/atau keterangan yang diminta	Dokumen, data, informasi dan/atau keterangan yang dipenuhi
1.		
2.	(11)	(12)

Wajib pajak yang bersangkutan (13) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tersebut sehingga penyelesaian permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diproses menggunakan data yang ada atau diterima.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tim Peneliti,

..... (14)

..... (15)

Mengetahui,
..... (16)

..... (17)



PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor berita acara.
- Nomor (3) : Diisi nama hari pelaksanaan kegiatan.
- Nomor (4) : Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan.
- Nomor (5) : Diisi bulan pelaksanaan kegiatan.
- Nomor (6) : Diisi tahun pelaksanaan kegiatan.
- Nomor (7) : Diisi nama, NIP, dan jabatan tim peneliti sesuai dengan surat tugas penelitian.
- Nomor (8) : Diisi nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan.
- Nomor (9) : Diisi tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan.
- Nomor (10) : Diisi nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam hal disampaikan secara langsung; atau
Diisi nama wajib pajak dan nomor bukti pengiriman surat dalam hal dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan disampaikan melalui pos atau jasa ekspedisi.
- Nomor (11) : Diisi uraian dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta.
- Nomor (12) : Diisi uraian dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dipenuhi.
- Nomor (13) : Diisi keterangan salah satu dari berikut ini, yaitu apakah “memenuhi seluruh”, “memenuhi sebagian”, atau “tidak memenuhi”.
- Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pihak yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam hal disampaikan secara langsung; atau
Diisi nama wajib pajak dan nomor bukti pengiriman surat dalam hal dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam hal disampaikan melalui pos atau jasa ekspedisi.
- Nomor (15) : Diisi jabatan, tanda tangan, dan nama pegawai yang ditugaskan meneliti Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.



Nomor (16) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani berita acara.

Nomor (17) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani berita acara.



J. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN

..... (1)

BERITA ACARA
PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN

NOMOR (2)

Pada hari ini (3), tanggal (4) bulan (5)
tahun (6), kami:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.			
2.	 (7)	 (7)	 (7)

sesuai dengan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan tambahan nomor (8) tanggal (9) dalam rangka
penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, telah
menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dari
..... (10) berupa:

No	Dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan tambahan yang diminta	Dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan tambahan yang dipenuhi
1.		
2.	(11)	(12)

Wajib pajak yang bersangkutan (13) permintaan
dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan tersebut sehingga
penyelesaian permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diproses
menggunakan data yang ada atau diterima.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tim Peneliti,

..... (14)

..... (15)

Mengetahui,

..... (16)

..... (17)



PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor berita acara.
- Nomor (3) : Diisi nama hari pelaksanaan kegiatan.
- Nomor (4) : Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan.
- Nomor (5) : Diisi bulan pelaksanaan kegiatan.
- Nomor (6) : Diisi tahun pelaksanaan kegiatan.
- Nomor (7) : Diisi nama, NIP, dan jabatan tim peneliti sesuai dengan surat tugas penelitian.
- Nomor (8) : Diisi nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
- Nomor (9) : Diisi tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
- Nomor (10) : Diisi nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam hal disampaikan secara langsung; atau
Diisi nama wajib pajak dan nomor bukti pengiriman surat dalam hal dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan disampaikan melalui pos atau jasa ekspedisi.
- Nomor (11) : Diisi uraian dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diminta.
- Nomor (12) : Diisi uraian dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang dipenuhi.
- Nomor (13) : Diisi keterangan salah satu dari berikut ini, yaitu apakah “memenuhi seluruh”, “memenuhi sebagian”, atau “tidak memenuhi”.
- Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pihak yang memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam hal disampaikan secara langsung; atau
Diisi nama wajib pajak dan nomor bukti pengiriman surat dalam hal dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam hal disampaikan melalui pos atau jasa ekspedisi.
- Nomor (15) : Diisi jabatan, tanda tangan, dan nama pegawai yang ditugaskan meneliti Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.



Nomor (16) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani berita acara.

Nomor (17) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani berita acara.



K. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH (1)

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ATAS (2)
BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK
NOMOR (3)

KEPALA KANTOR WILAYAH (4),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat wajib pajak atas nama (5) nomor (6) tanggal (7) yang diterima oleh (8) tanggal (9) berdasarkan Bukti Penerimaan nomor (10) tanggal (11), diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas (12) nomor (13) tanggal (14) Tahun Pajak (15);
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan nomor (16) tanggal (17);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas (18) karena permohonan wajib pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS (19) BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

KESATU : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/ Menolak*) permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak dalam suratnya nomor (20) tanggal (21)

2. Mengurangkan/Mempertahankan*) Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam (22) nomor (23) tanggal (24) Tahun Pajak (25)

atas:

wajib pajak	:	 (26)
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	 (27)
alamat	:	 (28)
Nomor Objek Pajak	:	 (29)
alamat Objek Pajak	:	 (30)

sebesar (31) % (..... (32) persen) dari besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang.



- KEDUA : Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan terutang Rp (33)
 - b. Besarnya pengurangan
(..... (34) % X Rp (35)) Rp (36)
 - c. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan
terutang setelah pengurangan Rp (37)

- KETIGA : Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ini disampaikan kepada:
..... (38)

Ditetapkan di (39)

Pada tanggal (40)

..... (41)

..... (42)

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan yang sesuai.



PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (2) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (3) : Diisi nomor surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (4) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (5) : Diisi nama wajib pajak.
- Nomor (6) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (8) : Diisi Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar.
- Nomor (9) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (10) : Diisi nomor bukti penerimaan surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (11) : Diisi tanggal bukti penerimaan surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (12) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (13) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan



Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Nomor (14) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (15) : Diisi tahun pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (16) : Diisi nomor laporan penelitian permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (17) : Diisi tanggal laporan penelitian permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (18) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (19) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (20) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (21) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (22) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (23) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan



Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Nomor (24) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (25) : Diisi tahun pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (26) : Diisi nama wajib pajak.
- Nomor (27) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (28) : Diisi alamat wajib pajak.
- Nomor (29) : Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (30) : Diisi alamat letak Objek Pajak yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (31) : Diisi besarnya persentase Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan dalam angka.
- Nomor (32) : Diisi besarnya persentase Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan dalam huruf.
- Nomor (33) : Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang belum dilunasi wajib pajak.
- Nomor (34) : Diisi besarnya persentase Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan dalam angka.
- Nomor (35) : Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (36) : Diisi besarnya Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.



- Nomor (37) : Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar setelah pengurangan.
- Nomor (38) : Diisi dengan nama dan alamat wajib pajak yang diberikan keputusan.
- Nomor (39) : Diisi kota tempat surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan.
- Nomor (40) : Diisi tanggal surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan.
- Nomor (41) : Diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (42) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.



L. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
melalui Kantor Pelayanan Pajak
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama : (5)
Nomor Pokok Wajib Pajak : (6)
jabatan : (7)
alamat : (8)
nomor telepon : (9)
bertindak selaku : ☐ wajib pajak ☐ wakil ☐ kuasa

dari wajib pajak:
nama : (10)
Nomor Pokok Wajib Pajak : (11)
alamat : (12)

bersama ini mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan:
nomor surat : (13)
tanggal surat : (14)
nomor Bukti Penerimaan : (15)
tanggal Bukti Penerimaan : (16)

Alasan permohonan pencabutan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan:
..... (17)

Demikian surat permohonan pencabutan ini kami sampaikan untuk dapat
disetujui.

Wajib pajak/wakil/kuasa*)

..... (18)

- Keterangan:
1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
 2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.



PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi nomor sesuai dengan penomoran surat wajib pajak.
- Nomor (2) : Diisi nama kota dan tanggal surat permohonan pencabutan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan pencabutan.
- Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (7) : Diisi jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan. Dalam hal permohonan pencabutan ditandatangani oleh wajib pajak Orang Pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi alamat wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (9) : Diisi nomor telepon wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (10) : Diisi nama wajib pajak dalam hal surat permohonan pencabutan ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.
- Nomor (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak dalam hal surat permohonan pencabutan ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.
- Nomor (12) : Diisi alamat wajib pajak dalam hal surat permohonan pencabutan ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.
- Nomor (13) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (14) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (15) : Diisi nomor bukti penerimaan surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.



- Nomor (16) : Diisi tanggal bukti penerimaan surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (17) : Diisi alasan permohonan pencabutan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (18) : Diisi tanda tangan dan nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.



M. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DISAMPAIKAN TIDAK PADA TEMPATNYA

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Disampaikan Tidak pada Tempatnya

Yth.
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor (7) tanggal (8) hal Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas (9) nomor (10) tanggal (11) yang diterima tanggal (12) disampaikan bahwa surat permohonan pencabutan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Saudara tidak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar.

Bersama ini kami kirimkan kembali surat permohonan pencabutan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Saudara untuk selanjutnya dapat disampaikan kembali melalui (13) sebelum diterbitkan surat keputusan terkait permohonan yang Saudara ajukan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (14)



PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS
PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DISAMPAIKAN
TIDAK PADA TEMPATNYA

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran.
- Nomor (6) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.
- Nomor (7) : Diisi nomor surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.
- Nomor (8) : Diisi tanggal surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.
- Nomor (9) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan pencabutan atas permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (10) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (11) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (12) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.
- Nomor (13) : Diisi nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat seharusnya wajib pajak menyampaikan surat permohonan pencabutan.
- Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.



N. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PENCABUTAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

..... (1)

Nomor	:	 (2)	 (3)
Sifat	:	 (4)	
Lampiran	:	 (5)	
Hal	:	Persetujuan Permohonan Pencabutan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	

Yth.
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor (7) tanggal (8) hal Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima tanggal (9) yang isi suratnya mencabut surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan nomor (10) tanggal (11), dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan penelitian kami, sampai dengan diterimanya surat permohonan pencabutan, surat keputusan terkait permohonan Saudara belum diterbitkan sehingga permohonan pencabutan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan disetujui.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (12)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PENCABUTAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran.
- Nomor (6) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.
- Nomor (7) : Diisi nomor surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.
- Nomor (8) : Diisi tanggal surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.
- Nomor (9) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.
- Nomor (10) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (11) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (12) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.



O. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Penolakan Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Yth.
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor (7) tanggal (8) hal Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima tanggal (9) yang isi suratnya mencabut surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan nomor (10) tanggal (11), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan penelitian kami bahwa atas permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut di atas telah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan nomor (12) tanggal (13).
2. Berdasarkan (14) mengatur bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah disampaikan sebelum diterbitkan surat keputusan.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan memperhatikan uraian pada angka 1, maka permohonan pencabutan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Saudara ditolak.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (15)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENCABUTAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran.
- Nomor (6) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.
- Nomor (7) : Diisi nomor surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.
- Nomor (8) : Diisi tanggal surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.
- Nomor (9) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.
- Nomor (10) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (11) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (12) : Diisi nomor surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diterbitkan.
- Nomor (13) : Diisi tanggal surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diterbitkan.
- Nomor (14) : Diisi dasar ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini yang mengatur mengenai dasar penolakan pencabutan.
- Nomor (15) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.



P. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENCABUTAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Pengembalian Permohonan Pencabutan Permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Yth.
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor (7) tanggal (8)
hal Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan yang diterima tanggal (9) yang isi suratnya mencabut surat
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan nomor (10)
tanggal (11), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan
..... (12) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c. dst. (13)
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini kami kembalikan surat
permohonan pencabutan dimaksud dan selanjutnya Saudara dapat
menyampaikan kembali permohonan pencabutan sebelum diterbitkan
surat keputusan terkait permohonan pengurangan Pajak bumi dan
Bangunan yang Saudara ajukan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (14)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENCABUTAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran.
- Nomor (6) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.
- Nomor (7) : Diisi nomor surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.
- Nomor (8) : Diisi tanggal surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.
- Nomor (9) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.
- Nomor (10) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (11) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.
- Nomor (12) : Diisi dasar ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini yang mengatur mengenai persyaratan permohonan pencabutan.
- Nomor (13) : Diisi uraian penjelasan pengembalian surat permohonan pencabutan.
- Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.



Q. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA JABATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH (1)

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ATAS (2)

SECARA JABATAN

NOMOR (3)

KEPALA KANTOR WILAYAH (4),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, diusulkan untuk diberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan atas (5) nomor (6) tanggal (7) Tahun Pajak (8);

b. bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan nomor (9) tanggal (10);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas (11) secara jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12



- Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS (12) SECARA JABATAN.

KESATU : Mengurangkan Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam (13) nomor (14) tanggal (15) Tahun Pajak (16):

atas:

wajib pajak	:	 (17)
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	 (18)
alamat	:	 (19)
Nomor Objek Pajak	:	 (20)
alamat Objek Pajak	:	 (21)

sebesar (22) % (..... (23) persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan terutang.

KEDUA : Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan terutang Rp (24)
- b. Besarnya pengurangan (..... (25) % X Rp (26)) Rp (27)
- c. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan terutang setelah pengurangan Rp (28)



KETIGA : Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ini disampaikan kepada:

..... (29)

Ditetapkan di (30)

Pada tanggal (31)

..... (32)

..... (33)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (2) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (3) : Diisi nomor surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (4) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (5) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (6) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (8) : Diisi Tahun Pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (9) : Diisi nomor laporan penelitian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal laporan penelitian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.



- Nomor (11) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (12) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (13) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (14) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (15) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (16) : Diisi Tahun Pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (17) : Diisi nama wajib pajak.
- Nomor (18) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi alamat wajib pajak.
- Nomor (20) : Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (21) : Diisi alamat letak Objek Pajak yang diberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (22) : Diisi besarnya persentase Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan dalam angka.



- Nomor (23) : Diisi besarnya persentase Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan dalam huruf.
- Nomor (24) : Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang belum dilunasi wajib pajak.
- Nomor (25) : Diisi besarnya persentase Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan.
- Nomor (26) : Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (27) : Diisi besarnya Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (28) : Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar setelah pengurangan.
- Nomor (29) : Diisi dengan nama dan alamat wajib pajak yang diberikan keputusan.
- Nomor (30) : Diisi kota tempat surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan.
- Nomor (31) : Diisi tanggal surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan.
- Nomor (32) : Diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (33) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

